



KR-Antara/Anis Efizudin

PANEN RAYA TEMBAKAU: Warga memanen daun tembakau di perladangan kawasan lereng Gunung Prau, Desa Cemoro, Tretep, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (27/8/2024). Bulan Agustus merupakan puncak musim panen raya tembakau di Kabupaten Temanggung, yang saat ini kualitas tembakau telah mencapai Grade D dengan harga jual berkisar Rp 70.000-Rp 75.000 perkilogram.

18.000 PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Wajib Teken Pakta Integritas Antijudol

JAKARTA (KR) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mewajibkan 18.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar segera menandatangani pakta integritas antijudi online (judol).

Menurut Menkominfo, Kementerian Kominfo telah menyiapkan pakta integritas pada akun pendaftaran PSE Privat untuk dapat dilengkapi dan dilaksanakan oleh PSE Privat.

"PSE privat wajib segera melengkapi pemenuhan pakta integritas secepatnya. Jika tidak kami akan cabut tanda daftar PSE-nya," kata Menkominfo di Kantor Kemenkominfo di Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Menkominfo menjelaskan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara

Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) wajib untuk melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, berdasarkan PM 5/2020 Pasal 7, PSE Privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking). Pasal 9 juga menyebutkan, PSE Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. "Kita

harus memastikan ruang digital yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Menkominfo. Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Teguh Arifiyadi mengungkapkan, Kemenkominfo akan menindak tegas penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online atau yang sering disebut judol. Penindakan tegas tersebut didasari acuan data terbaru Kemenkominfo, dimana transaksi judol telah mencapai angka hampir Rp 400 triliun, dengan jumlah pemain yang meningkat tajam menja-di 3 juta orang.

Teguh menyampaikan, bagi penyelenggara sistem khususnya barang dan jasa serta transaksi keuangan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Jika tidak, maka Kemenkominfo memiliki kewenangan untuk pemutusan akses.

(Ant/San)-d

Fasilitas

Pada dasarnya pembangunan memang membutuhkan dana yang sangat besar, termasuk IKN. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Politik hukum Investasi di Era Orde baru dengan berbagai fasilitas, telah membuahkan hasil bagi masyarakat, hingga Presiden Soeharto diberi julukan Bapak Pembangunan.

Investasi menjadi tumpuan penyelesaian pembangunan IKN. Presiden Jokowi sendiri mengklaim ada 472 Investor yang berminat. Fasilitas apa yang menarik? Di era reformasi ini tentunya lebih baik dari orde baru. Dari sisi Investor, prinsip utama Investasi adalah Jaminan Kepastian hukum dan Perlindungan Investor. Mengacu kebijakan hukum UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, kemungkinan yang menarik Investor adalah:

Pertama, apabila investasi jangka panjang dan terkait struktur ekonomi Indonesia, tidak mengganggu keadilan masyarakat, ada risiko pengembalian modal, dan menggunakan tanah negara maka ada fasilitas pemberian hak atas tanah, selama 95 tahun untuk HGU. Kedua, bagi investor yang mendatangkan tenaga kerja asing, ada fasilitas pemberian izin tinggal terbatas dan perubahan

status izin tinggal terbatas menjadi tetap.

Ketiga, fasilitas Pajak Penghasilan (PPn), diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan netto sampai dengan tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Keempat, pembebasan bea impor barang modal yakni pelepasan kewajiban membayar bea masuk atas barang modal.

Kelima, fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk untuk bahan baku atau bahan penolong produksi. Keenam, pembebasan atau penangguhan pajak PPn untuk impor barang modal atau mesin maupun barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia.

Ketujuh, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, yakni upaya pemerintah untuk mengurangi atau menghapus harta kekayaan investor yang digunakan dalam pelaksanaan penanaman modal. Kedelapan, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para investor dalam penggunaan hak atas tanah sebesar 50%. Kesembilan, pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan kepada investor baru dalam industri pioner.

Sembilan fasilitas tersebut merupakan politik hukum penanaman modal pada umumnya. Secara khusus berdasarkan UUNomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 ten-

tanang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, terdapat beberapa fasilitas Investasi.

Pertama, tidak ada persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing untuk usaha tertentu. Artinya perizinan usaha untuk bidang terbuka dan tertutup seperti yang ditentukan dalam UU No. 27/2007 tentang Penanaman Modal tidak berlaku bagi Investor pembangunan IKN. Kedua, sertifikat laik fungsi dan persetujuan bangunan gedung di IKN langsung diberikan oleh Kepala Otorita IKN sehingga mempercepat proses pembangunan. Ketiga, izin berusaha bagi para investor diberikan langsung oleh orotita Ibu Kota Negara. Keempat, mengenai hak atas tanah secara umum memiliki persamaan dengan UU No. 25/2007, bedanya pada jangka waktu hak pakai.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, tentunya orang tidak perlu ragu untuk Investasi di IKN, karena disamping ada kepastian hukum dan perlindungan Investor, pembangunan IKN ini mengedepankan beberapa prinsip dasar yakni, prinsip mengembangkan kawasan, mengembangkan ekonomi, pembangunan sosial dan SDM, penyediaan dan pengelolaan pertanahan, dan prinsip pembangunan infrastruktur.

(Penulis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta)-d

KEKERASAN DALAM PENANGANAN AKSI DEMO

Komnas HAM Desak Polda Evaluasi

JAKARTA (KR) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak kepolisian daerah (polda) untuk mengevaluasi penanganan aksi demonstrasi di Semarang Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Senin (26/8). Komnas HAM meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, serta mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum," ucap Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro di Jakarta, Selasa (27/8).

Di sisi lain, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang diamankan.

"Menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM,

yakni hak atas keadilan," tegas Atnike.

Komnas HAM juga mendorong semua pihak menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif. "Untuk merawat ruang demokrasi bangsa baik saat ini maupun di masa depan," ujarnya.

Komnas HAM menyampaikan pesan itu merespons aksi demonstrasi yang terjadi di Semarang dan Makassar hingga Senin (26/8) malam. Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa aparat keamanan menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi, dan diduga melakukan penyapuan (sweeping) hingga masuk ke area publik seperti mal.

Ketua Komnas HAM mengingatkan, penggunaan kekuatan berlebih hingga kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar hak asasi. "Khususnya dalam hal ini pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang HAM," tandas Atnike. (Ant/Has)-d

Aksi

Perwakilan mahasiswa M Rafsan Jzani menegaskan, aksi ini tidak ada kaitannya dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Yogyakarta, Rabu (28/8) hari ini. Namun sebagai bentuk keprihatinan telah matinya demokrasi Indonesia. Apalagi saat ini bertepatan dengan pendaftaran Pilkada.

Sambungan hal 1

Untuk itu, mereka akan tetap turun ke jalan selama masa pendaftaran tersebut.

"Hari ini (kemarin, red) kita aksi damai. Besok (hari ini, red) kita akan ada aksi teatrikal di titik nol. Dan di hari penutupan pendaftaran Pilkada kita masih akan melakukan unjuk rasa," ujarnya. (Awh)-f

Andika-Hendrar

ia juga pernah menjabat Kapolda. Ahmad Luthfi menyatakan akan mundur dari Korps Bhayangkara setelah nantinya ada penetapan pasangan calon peserta pilkada dari KPU. Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin berencana mendaftar ke KPU, Kamis (29/8).

Dalam acara penyerahan rekomendasi dukungan di Kantor Pusat DPP Partai Demokrat, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas dukungan itu.

Ia mengatakan, Jateng merupakan center of gravity dari pusat kegiatan masyarakat.

Sambungan hal 1

Oleh karena itu, ia berkeinginan menjadikan Jateng sebagai provinsi yang lebih baik dibanding daerah lain.

Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saat ini didukung partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). KIM merupakan koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

(Ant/Obi)-d

Golkar

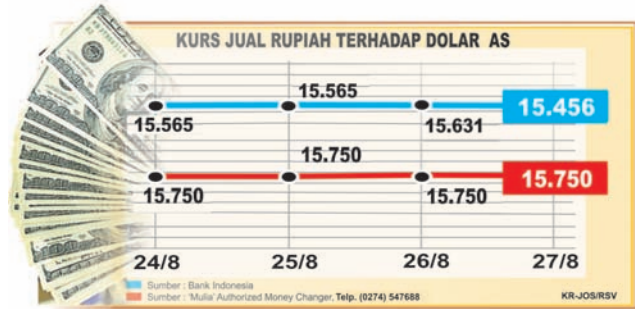
Atas keputusan itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan KIM tetap kompak meski Golkar mengikuti jejak PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi.

"Tadi malam (kemarin) saya sebagai ketua umum partai berkewajiban mengkomunikasikan ke semuanya (KIM). Semua dalam kerangka kebersamaan," kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, kemarin.

Menurut Bahlil, bergabungnya Golkar dan PDIP mengusung Airin-Ade merupakan bagian dari dinamika politik. Dinamika politik itu, lanjutnya, kerap terjadi dalam kontestasi pemilu demi mencapai kesamaan dalam memajukan bangsa.

Ia sendiri memastikan langkah politik yang diambil untuk menggandeng PDIP di Banten telah melalui pertimbangan yang matang dan tak akan mengganggu keharmonisan internal KIM. Oleh karena itu, ia yakin KIM tidak akan terpecah hanya karena ada duet Airin dan Ade di Banten.

Menurut Bahlil, keputusan mengusung Airin Rachmi Diany sudah dipikirkan sejak lama dan sengaja diumumkan pada hari-hari terakhir sebelum pendaftaran. Ia membantah keputusan Partai Golkar mengusung Airin ini dipicu langkah PDIP yang lebih dulu mengusung pasangan Airin-Ade Sumardi pada Pilkada Banten.



Prakiraan Cuaca					28 Agustus 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir		

Grails : Afrio

Mengenal Manfaat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB



Widnyanti Kurnianingsih, SE MA, AKK CRA
Ka Prodi Akuntansi
Universitas Amikom
Yogyakarta

PAJAK salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah Pajak Bumi Bangunan atau kita kenal dengan PBB. Batas waktu pembayaran PBB setiap tahunnya biasanya adalah tanggal 31 Agustus. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas PBB

ini dikenal untuk pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki sebagai hak dan manfaat yang diterima dari kepemilikan tersebut.

Contoh objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu:

- Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan: rumah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
- Objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan: rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan jalan tol.

Seiring berkembangnya zaman banyak masyarakat memiliki investasi untuk tabungan masa depan. Investasi paling banyak dimiliki yaitu property, berupa rumah, bangunan, gedung, toko maupun tanah yang nilai

jualnya naik setiap tahunnya. Apalagi jika memiliki rumah dan bangunan yang berada di daerah perkotaan. Dengan memiliki property tersebut tentunya harus menyiapkan untuk pembayaran pajak setiap tahunnya, sebab pajak memiliki peran yang begitu besar dalam pembangunan dan menjadi sumber pendapatan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang perlu dibayarkan adalah PBB. Jangan lupa setiap tahunnya untuk menysihkan anggaran pengeluaran pajak PBB ini, karena pajak bersifat wajib dan jika tidak dibayarkan, maka akan menimbulkan denda atas kekurangan maupun keterlambatan dalam pembayaran pajak.

Pajak Bumi Bangunan memiliki berbagai manfaat bagi Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

dan selain itu PBB adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik atau pengguna tanah dan bangunan serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, PBB tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik atau pengguna tanah dan bangunan mendorong pemanfaatan lahan yang efisien, mengendalikan spekulasi tanah, dan meningkatkan keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, PBB dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam

PBB memegang peran penting bagi wajib pajak yang ingin menjaga aset untuk kebutuhan bisnis, karena salah satu fungsi SPPT dianggap sebagai bukti penanda kepemilikan tanah atau banguna selain IMB (Izin Mendirikan angunan) atau sertifikat.

Fungsi surat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Meski sering disertakan bersamaan IMB dan sertifikat namun surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Bukti hak dan kepemilikan tanah atau bangunan adalah sertifikat sementara IMB untuk

menunjukkan bahwa bangunan yang didirikan sesuai izin peraturan yang berlaku dan SPPT PBB sebagai penentu atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada pemiliknya.

Fungsi Penting SPPT PBB bagi Wajib Pajak

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB meskipun tidak diartikan sebagai bukti hak dan kepemilikan suatu tanah atau bangunan namun memegang fungsi penting bagi Wajib Pajak saat proses mengumpulkan dokumen lengkap menjaga atau melindungi aset berharga.
- Sebagai salah satu elemen untuk menghindari tanah atau bangunan itu direbut hak miliknya atau terjadi penipuan.
- Sebagai surat yang menunjukkan besaran



Creative Economy Park

beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak.

SPPT PBB dapat diambil langsung di kantor kelurahan atau di KPP Pratama setempat, tempat objek pajak terdaftar atau yang telah ditentukan.

Demikian penjelasan lengkap tentang manfaat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB yang tidak hanya memiliki fungsi penting dalam Pajak Bumi dan Bangunan tapi juga untuk Wajib Pajak itu sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat terutama bagi yang ingin mengurus atau membangun aset tanah dan bangunan untuk kesuksesan bisnisnya.